

ABSTRAK

Wiguna: “Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Penanggulangan Bencana Kebakaran di Dinas Kebakaran Kabupaten Bandung”

Dinas Kebakaran merupakan unsur pelaksana pemerintah yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah bencana kebakaran dan merupakan sub urusan bagian dari urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yang mana metode ini digunakan untuk mengumpulkan data serta menggambarkan kandungan data. Metode ini juga menggunakan pendekatan *kualitatif* yakni suatu pendekatan yang tidak memerlukan suatu perhitungan namun berdasarkan suatu kualitas. Metode pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum target capaian indikator standar pelayanan minimal penanggulangan bencana kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 69 tahun 2012 sampai saat ini belum tercapai dikarenakan dari banyaknya kejadian kebakaran yang cenderung meningkat dengan kompleksitas yang semakin sulit di Kabupaten Bandung, serta keterjangkauan wilayah yang tersebar menyulitkan untuk penanggulangannya, disamping itu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dalam bidang pemadam kebakaran, kurangnya simulasi dan gladi penanggulangan kebakaran yang seharusnya dilaksanakan secara rutin dan terprogram, realitasnya tidak diimbangi dengan kemampuan Dinas Kebakaran yang hanya memiliki 3 pos wilayah manajemen kebakaran yaitu WMK Soreang, WMK Ciparay, dan WMK Cicalengka, mobil pemadam kebakaran yang hanya berjumlah 8 unit dan kurangnya aparatur pemadam kebakaran yang saat ini hanya memiliki 116 orang, serta kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman kebakaran seperti selang damkar, nozzle damkar, APD (alat pelindung diri) petugas, pompa portable damkar, dan peralatan rescue penyelamatan lainnya.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal, Penanggulangan Bencana Kebakaran